
**ENERGI SOSIAL DI PEDESAAN DALAM MEMBERDAYAKAN
PEMBANGUNAN DI DESA
(Penelitian pada beberapa daerah pedesaan di Kabupaten Pacitan Jawa Timur)**

Masrukhi, M.Pd.

Jurusan Politik dan Kewarganegaraan FIS UNNES

Indah Sri Utari, M.Hum

Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

*social energy, empowerment, rural
development*

Abstrak

Dalam kesederhanaan kehidupan masyarakat desa, terkandung energi sosial yang mampu menggerakkan dinamika pembangunan setempat. Energi sosial itu tumbuh dan berkembang dalam irama kehidupan masyarakat desa. Keberadaannya sangat kuat oleh karena diikat oleh tatanan nilai-nilai lokal berupa kekerabatan, nilai budaya dan kepemimpinan lokal. Oleh karena itu yang sangat menarik dari kajian ini adalah bagaimana energi sosial di desa menggerakkan dinamika pembangunan masyarakat desa. Dengan mengambil setting di desa terpencil pada tiga kecamatan di Kabupaten Pacitan, yaitu kecamatan Donorojo, kecamatan Tulakan, dan kecamatan Tegal Ombo, dan studi kasus sebagai pendekatan penelitiannya, kajian ini menjadi sangat penting oleh karena para pengambil kebijakan pembangunan di pedesaan tidak dapat mengabaikan keberadaan energi sosial ini dalam upaya memberdayakan masyarakat bagi pembangunan di pedesaan.

Abstract

In the simplicity of village life, embodied energy that can move the social dynamics of local development. Social energy that grow and develop in the rhythm of village life. Present at very strong by being bound by the order of local values in the form of kinship, cultural values and local leadership. Therefore, it is very interesting from this study is how to mobilize social energy in rural development dynamics of rural communities. Set in northern remote villages in three districts in Pacitan, namely districts Donorojo, sub Tulakan, and sub Tegal Ombo, and case studies as an approach to research, this study is very important because policy makers rural development can not ignore the existence of energy this social in an effort to empower communities for rural development.

© 2016 Universitas Negeri Semarang

* Alamat korespondensi

- masrukhi@mail.unnes.ac.id
- indahsuji@mail.unnes.ac.id

PENDAHULUAN

Dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia selama ini, masyarakat pedesaan dengan nilai, kepemimpinan dan kearifan-kearifan yang dimilikinya acapkali disingkirkan atas nama “pembangunan”, dan “modernisasi masyarakat terbelakang” (Albrow, 2006; Anderson, 1996; Beilharz, 2002). Mereka dianggap bersifat “dekaden”, “pasif”, dan “primitif” yang berarti anti-modernitas (Beilharz, 2002). Maka tidak heran, jika atas nama pembangunan, terjadi proses marginalisasi dan penaklukan terhadap masyarakat pedesaan.

Oleh program pembangunan dengan sekalian produknya, masyarakat pedesaan makin kehilangan wahana untuk mengaktualisasikan hak-hak dasar mereka, seperti hak menunaikan ritual, hak untuk mengembangkan warisan budaya dan lain sebagainya (Albrow, 2006; Beilharz, 2002).

Secara umum, akibat hubungan konfliktual itu, tidak saja telah menimbulkan fragmentasi sosial yang rawan konflik, tetapi juga telah mengurangi pemanfaatan maksimal terhadap kekayaan “energi sosial” yang dimiliki masing-masing kelompok itu bagi kedamaian dan kesejahteraan bersama. Bagi masyarakat pedesaan, akibat marginalisasi dan penaklukan sistematis itu, adalah (1) “Energi sosial-budaya kreatif” yang dimilikinya sebagai modal sosial bagi kesejahteraan mereka, ikut dikorbankan”. (2) Sumber-sumber pengetahuan tradisional dan lokal yang sebenarnya merupakan kearifan lokal yang bermanfaat bagi kelangsungan hidup para pendukungnya maupun bagi tujuan-tujuan pembangunan secara umum, ikut tersingkirkan. Dalam

kerangka kepentingan pembangunan ke depan, paradigma pembangunan seperti itu tidak lagi fungsional. Harus ada upaya yang sistematis dan konseptual untuk membangun paradigma baru yang bertumpu pada keadilan, kesejahteraan, emansipasi dan partisipasi dari masyarakat yang menjadi sasaran pembangunan.

Penelitian ini akan memusatkan perhatian pada energi sosial-budaya kreatif (selanjutnya disebut: energi sosial) dalam kelembagaan lokal di pedesaan Pacitan sebagai modal sosial (*social capital*) setempat yang potensial menunjang kesejahteraan dan penyelenggaraan otonomi daerah. Kelembagaan lokal dimaksud, adalah “pola perilaku yang mantap” berupa organisasi ataupun non-organisasi yang ada di lingkungan kecamatan dan desa.

Ada dua proposisi penelitian ini. *Pertama*, energi-energi sosial-budaya kreatif yang dimiliki masyarakat, selain merupakan modal sosial (*social capital*) yang berfungsi menjamin kesejahteraan bersama antara warga dan kelompok masyarakat setempat, juga diduga berperan sebagai jaringan kerjasama dengan pihak luar, termasuk dengan pemerintah. *Kedua*, di tengah keterbatasan sumber daya yang dihadapi pemerintah daerah (SDM, SDA, finansial), pendayagunaan energi sosial lokal akan sangat membantu pelaksanaan otonomi daerah yang bertopang pada ketahanan dan kemandirian daerah. Masalah pokok dalam kajian ini adalah, kelembagaan lokal dan energi sosial apa sajakah yang dimiliki masyarakat pedesaan di Pacitan, yang mampu mengeliminir kemiskinan dan potensial menunjang otonomi daerah.. Dari masalah pokok tersebut, beberapa

pertanyaan riset dimunculkan sebagai berikut. *Pertama*, sejauhmana dukungan keluarga dan ikatan kekerabatan berfungsi sebagai media kerjasama dan tolong-menolong dalam mengatasi masalah yang dihadapi para warga di masing-masing lingkungan sosial yang ada. *Kedua*, jaringan dan bentuk kerjasama apa sajakah yang dikembangkan di antara satuan lokalitas. *Ketiga*, sejauhmana dalam pola/nilai budaya lokal pada tiap komunitas budaya, berakar pranata-pranata yang bersifat menjamin kesejahteraan bersama dan ketahanan sosial setempat. *Keempat*, sejauhmana kepemimpinan lokal memiliki potensi sebagai energi sosial yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama lewat berbagai kegiatan atau urusan. *Kelima*, apakah sekalian energi sosial lokal yang dimiliki masyarakat itu, dapat/telah diintegrasikan secara sinergis dengan paket program pemerintah daerah dalam kerangka otonomi, baik menyangkut kebijakan administratif dan managerial, perencanaan, legislasi/regulasi, serta pelayanan publik. Dan *Keenam*, faktor-faktor apakah yang perlu diperhatikan dalam upaya men-dayagunakan energi sosial lokal yang ada bagi kepentingan otonomi daerah, khususnya di lingkungan pedesaan di Pacitan.

Kajian ini dimaksudkan sebagai upaya menemukan potensi energi sosial kreatif di tingkat lokal (kecamatan dan desa) yang di dalam kemandiriannya mampu membina kerjasama dalam beragam ikatan sosial dan dalam ragam kerjasama yang dibina bersama, baik dalam lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar. Pengungkapan energi sosial lokal dimaksud,

dikaji pada empat aspek kelembagaan lokal yang ada di lingkungan pedesaan Pacitan, yakni: pada tingkat kekerabatan, lokalitas, nilai budaya, dan kepemimpinan lokal.

Untuk kepentingan penelitian ini, energi sosial lokal hendak dikaji pada empat aspek kelembagaan lokal yang ada, dengan perincian sebagai berikut. *Pertama*, kekerabatan: menyangkut sistem dukungan keluarga dan ikatan kekerabatan yang ada pada masing-masing lingkungan sosial dalam menghadapi dan mengatasi suatu masalah/kebutuhan. *Kedua*, lokalitas: bentuk kerjasama dalam masyarakat lokal di luar sistem keluarga dan kekerabatan, seperti tolong-menolong, arisan, dan bentuk kerjasama lainnya. Temuan Tim IPB menunjukkan bahwa di beberapa daerah pedesaan telah berkembang Koperasi Kredit Simpan Pinjam yang mempersatukan orang/keluarga/warga desa dari berbagai lapisan (Arinanto, 2001). *Ketiga*, nilai budaya: sejauhmana dalam pola budaya lokal berakar pranata-pranata yang bersifat menjamin kesejahteraan dan ketahanan sosial. *Keempat*, kepemimpinan lokal: sejauhmana kepemimpinan lokal memiliki potensi sebagai energi sosial yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama. Kepemimpinan lokal di pedesaan terutama bertumpu pada pemuka adat, agama, dan pimpinan formal pemerintah desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosio-antropologi yang memadukan beragam kajian disiplin ilmu (sosiologi, antropologi, politik, ekonomi, dan

administrasi/komunikasi pembangunan). Metode yang dipakai adalah metode kualitatif (Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K, 2002). Dengan menggunakan metode studi kasus, dipilih tiga wilayah lingkungan ekosistem yang beragam di lingkungan Kabupaten Pacitan, sebagai setting penelitian, yaitu Kecamatan Donorojo (Desa Kalak dan Desa Widoro), Kecamatan Tulakan (Desa Jati gunung (Desa Plapar), Kecamatan Tegal Ombo (Desa Tegal Ombo), Kecamatan Pacitan (Desa Sirno Boyo dan Desa Sambong). Proses pemilihan sampel wilayah itu ditempuh lewat prosedur *purposive sampling*. Semua desa yang dijadikan sampel wilayah penelitian bercorak desa pertanian.

Data digali dari tangan pertama (informan dan responden) di desa, kecamatan, dan kabupaten kasus itu. Studi kasus melibatkan tokoh adat, pejabat pemerintah, pemuka lokal, dan warga masyarakat dari tingkat desa, kecamatan, dan kabupaten sebagai (mitra) peneliti. Penggalan data dilakukan dengan teknik observasi, *indepth interview*, FGD. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Pada tahap awal, dilakukan pengelompokan data menurut unsur kajian (dengan memakai model pengkodean Strauss dan Corbin, yakni *opencoding* dan *axial coding* (Bachtiar, 1990). Tahap kedua dilanjutkan dengan penataan hubungan antar-unsur kajian. Tahap berikutnya, mengkonfirmasi simpulan tentang keterkaitan unsur kajian tersebut dengan informan/responden. Kemudian dilanjutkan diskusi dengan para ahli yang kompeten mengenai simpulan sementara peneliti. Tiap penyimpulan dan generalisasi pada tiap aras wilayah studi,

selalu didahului kegiatan konfirmasi data dan seminar, baik dengan (wakil) informan dan responden maupun dengan para ahli. Sebagai tahap akhir, dilakukan konseptualisasi untuk merumuskan hasil temuan.

HASIL PEMBAHASAN

Energi Sosial Dalam Kelembagaan Lokal di Pedesaan Pacitan

Energi sosial masyarakat di pedesaan Pacitan, diidentifikasi dalam empat aspek utama, yaitu: kekerabatan, lokalitas, nilai budaya dan kepemimpinan lokal.

Energi sosial dalam kekerabatan dalam lingkungan mereka terjalin dalam dua tipe, yaitu keluarga inti dan keluarga luas. Persekutuan adat berupa klan seperti umumnya dikenal dalam masyarakat adat tidak ditemukan. Dukungan utama yang dapat disumbangkan oleh kedua unit kekerabatan itu pada seorang petani adalah sumbangan tenaga. Mereka tidak mampu mendukung dalam bentuk bantuan modal karena merupakan keluarga miskin. Padahal kebutuhan yang paling pokok dari seorang petani dalam usaha pertanian dalam mengembangkan mata pencahariannya adalah modal. Energi sosial dalam lokalitas di kalangan masyarakat desa di Pacitan pada umumnya terjadi dalam bentuk gotong-royong menggarap tanah dan koperasi simpan pinjam. Bentuk gotong-royong dilakukan melalui mekanisme sewa alat pertanian, sewa lahan, dan sewa buruh tani.

Sedangkan energi sosial dalam nilai budaya adalah berupa sikap terhadap hidup. Sikap hidup orang petani di Pacitan bukanlah “ini atau itu”, melainkan “baik ini maupun itu” atau “bukan ini bukan itu”, artinya bukan

“terarah pada hidup ini”, juga bukan pula “terarah pada yang di luar hidup ini”.

Wujud paling nyata dari sikap tersebut adalah *narima*, ikhlas dengan segala keterbatasan yang ada. Sikap ini memunculkan *aja kesusu*, karena narima dipahami sebagai sabar menunggu waktu. *Aja ngaya*, karena narima berarti tenang, santai, menerima segala keterbatasan. Juga, sikap *aja serakah*, karena narima berarti ikhlas menerima apa yang telah ditentukan menjadi bagian kita. Narima bukan berarti tidak berusaha sebaik-baiknya. Peneakanannya terletak pada : tidak memaksakan sesuatu. Dalam narima juga tetap terdapat upaya untuk maju dan berkembang, namun upaya tersebut bukanlah tujuan akhir karena kemajuan dan perkembangan pada akhirnya adalah untuk mengembalikan keserasian, keseimbangan, dan kesatuan.

Sesuatu yang khas dalam pandangan mereka, realitas tidak dibagi dalam berbagai bidang yang terpisah tanpa hubungan satu sama lain, melainkan merupakan satu kesatuan yang menyeluruh. Hal ini berbeda dengan alam pikiran dunia Barat yang membedakan secara tegas antara dunia, masyarakat, dan alam adikodrati dimana masing-masing memiliki hukumnya sendiri. Selain sikap terhadap hidup, terdapat juga sikap terhadap kerja. Pandangan yang umum dianut dalam masyarakat desa di Pacitan adalah bahwa kerja sebagai petani merupakan bentuk kerja yang tergolong "kerja kasar". Apabila mungkin, kerja kasar itu perlu dihindari. Ia diperlukan, tapi tidak memiliki makna pada dirinya. Dalam keluarga petani di Pacitan, kerja dipahami sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lain. Motif dasar seorang petani dalam

pandangan mereka misalnya, bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagai suatu rutinitas. Berbeda halnya dengan pandangan para kelompok priyayi di Jawa pada umumnya, di mana kerja dipandang sebagai upaya mempertahankan tatanan. Begitu juga dengan kelompok santri juga melihat kerja sebagai upaya mendapatkan amal.

Di kalangan masyarakat desa di Pacitan, apabila kebutuhan tersebut telah terpenuhi, maka dorongan untuk bekerja keras tidak lagi menjadi prioritas karena sikap hidup yang *aja ngaya* (tidak boleh memaksakan diri). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bagi orang petani, bekerja tidak terutama berorientasi pada prestasi.

Selanjutnya sikap terhadap waktu. Bagi mereka pada umumnya, waktu bukanlah yang utama. Jika sebagian masyarakat berprinsip waktu adalah uang, maka bagi mereka, waktu dan uang bukanlah yang terutama karena pada waktunya, segala sesuatu akan selesai dengan sendirinya. Harus sabar menunggu sampai waktu yang baik itu tiba, *aja kesusu* (jangan terburu-buru). Pada pandangan mereka, ada kesadaran akan kesinambungan yang amat dalam karena dalam pandangan Jawa waktu berjalan melingkar. Segala sesuatu berulang. Oleh karena itu, kebenaran adalah untuk dipertahankan dan dipelihara, bukan dicari. Keselarasan adalah untuk dipulihkan, bukan untuk dibentuk baru kembali setiap kali. Tradisi adalah untuk dipertahankan, bukan untuk dinilai dan diubah.

Demikian pula sikap terhadap alam. Mayoritas dari mereka memandang alam bukan sebagai sesuatu yang menguasai manusia, juga bukan sebagai obyek yang

harus ditundukkan, melainkan sebagai subyek sama seperti manusia karena keduanya tergantung sama lain. Oleh karena itu, keselarasan dan keserasian antara keduanya harus senantiasa dijaga. Hal ini seperti pada umumnya pandangan masyarakat Jawa bahwa pada hakekatnya petani Jawa tidak membedakan antara sikap religius dan bukan religius. Interaksi sosial sekaligus merupakan sikap terhadap alam, sebagaimana juga sikap terhadap alam sekaligus mempunyai relevansi social (Mulder, 1973:36) Setiap pribadi adalah jagad cilik yang mencerminkan jagad gede. Kerukunan harus dipelihara antara manusia dengan alam. Gangguan pada alam dimengerti sebagai peringatan, bahwa ada sesuatu yang salah pada hubungan antara mikrokosmos. Penebang pohon, menanam padi, atau membangun rumah, bukanlah sekedar masalah teknis. Sekalipun itu hanya dapat dikerjakan setelah alam memberi ijin untuk itu, yaitu setelah upacara-upacara tertentu dilaksanakan.

Selanjutnya sikap terhadap sesama. Pada umumnya mereka berpandangan bersifat totalistik, dualistik, dan hirarkis. Hal ini seperti pandangan masyarakat pedesaan di Jawa pada umumnya. Sikap yang totalistik, menempatkan individu sebagai bagian dari suatu ketertiban yang menyeluruh dan yang telah ditentukan. Cara pandang dualistik menuntut agar perbedaan antar individu diseimbangkan, bukan didorong atau dilenyapkan. Sedangkan pandangan yang hirarkis memandang konformitas pada status yang telah ditetapkan merupakan kunci bagi keserasian.

Sistem nilai pada komunitas mereka

tidak memberikan ruang yang cukup bagi ekspresi individu. Dapat dimengerti apabila di kalangan mereka kurang menghargai inisiatif individual karena dianggap meninggalkan tempat yang terjamin dan mengganggu keseimbangan yang sudah ada. Seperti ditegaskan oleh Frans Magnis Suseni bahwa pada tataran psikologis, inisiatif mudah menimbulkan ketegangan dan mengganggu ketenangan batin. Kondisi yang bertolak dari hubungan koordinasi yang erat antara bidang duniawi dan adiduniawi ini selalu akan mendukung sikap konservatif dan menolak perubahan-perubahan (Beilharz, 2002).

Sikap seperti itu akan lebih dimengerti jika ditempatkan dalam konteks pandangan dunia orang Jawa secara keseluruhan. Dalam pandangan Geertz (1961:146). Ada dua kaidah yang paling menentukan dalam pola pergaulan masyarakat Jawa. Kaidah pertama adalah prinsip kerukunan, yaitu bahwa dalam setiap situasi manusia hendaknya bersikap sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan konflik. Kaidah kedua merupakan prinsip hormat yang menuntut agar manusia senantiasa menunjukkan sikap hormat terhadap orang lain, sesuai dengan derajat dan kedudukannya. Kedua prinsip itu merupakan kerangka normatif yang menentukan bentuk-bentuk konkret semua interaksi masyarakat Jawa (Beilharz, 2002).

Prinsip kerukunan bertujuan untuk mempertahankan masyarakat dalam harmoni. Rukun berarti “berada dalam keadaan selaras”, tenang dan tentram”, tanpa perselisihan dan pertentangan”, “bersatu dalam maksud untuk saling membantu”. (Murder, 1978:39). Rukun adalah keadaan

ideal yang diharapkan dapat dipertahankan dalam semua hubungan-hubungan sosial : dalam keluarga, di desa, atau juga dalam setiap pengelompokan tetap.

Terdapat dua segi tuntutan kerukunan. *Pertama*, dalam pandangan Jawa masalahnya bukan penciptaan keadaan keselarasan sosial, melainkan lebih pada untuk tidak mengganggu keselarasan yang diandaikan sudah ada. Dalam perspektif Jawa ketenangan dan keselarasan sosial merupakan keadaan normal yang akan terdapat dengan sendirinya selama tidak diganggu. Prinsip kerukunan menuntut untuk mencegah segala cara kelakuan yang bisa mengganggu keselarasan dan ketenangan dalam masyarakat. Rukun berarti berusaha untuk menghindari pecahnya konflik-konflik. Oleh karena itu prinsip kerukunan sebaiknya tidak disebut prinsip keselarasan melainkan, dengan mengikuti Ann R. Willner, “prinsip pencegahan konflik (Beilharz, 2002).

Kedua, penjagaan keselarasan dalam pergaulan. Artinya, yang diatur adalah permukaan hubungan-hubungan sosial yang kentara sehingga yang perlu dicegah adalah konflik yang terbuka. Hildred Geertz menyebut keadaan rukun ini sebagai *harmonius social appearances* (Gertz, 1973: 72).

Kerukunan menuntut agar individu bersedia menomorduakan, bahkan, kalau perlu, melepaskan kepentingan pribadi demi kesepakatan bersama (Benda, 1969:86). Mengusahakan keuntungan pribadi tanpa memperhatikan persetujuan masyarakat, berusaha untuk maju sendiri tanpa mengikutsertakan kelompok dinilai kurang baik. Begitu pula mengambil inisiatif sendiri

cenderung tidak disukai. Individu seharusnya selalu bertindak bersama dengan kelompok. Mengambil posisi-posisi yang terlalu maju, meski pada akhirnya akan menguntungkan bagi seluruh kelompok, juga dianggap tidak pantas (Mulder, 1973:86).

Motivasi untuk bertindak rukun bersifat ganda : di satu pihak individu berada di bawah tekanan berat dari pihak lingkungannya yang mengharapkannya bersikap rukun dan memberi sanksi terhadap kelakuan yang tidak sesuai, sedangkan di lain pihak individu merasa bersalah dan malu apabila kelakuannya mengganggu kerukunan. Dalam etika dibedakan antara prinsip moral dan prinsip penata masyarakat. Prinsip moral menuntut sikap batin yang memang harus terwujud dalam tindakan lahiriah, sedangkan prinsip penata masyarakat memuat norma kelakuan yang sepenuhnya dipaksakan oleh masyarakat tidak peduli bagaimana sikap batin seseorang. Termasuk di dalamnya adalah norma hukum.

Prinsip kedua yang dirasakan sangat menentukan dalam pola pergaulan masyarakat Jawa menurut Hildred Geertz adalah prinsip hormat. Prinsip ini didasarkan pada suatu cita-cita tentang suatu masyarakat yang teratur baik, di mana setiap orang mengenal tempat dan tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan suatu kesatuan yang selaras. Mereka yang berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat. Apabila setiap orang menerima kedudukannya, maka tatanan sosial terjamin. Oleh karena itu orang jangan mengembangkan ambisi, persaingan, karena merupakan sumber bagi segala perpecahan, ketidakselarasan dan kontra-

diksi (Mulder, 1990:41).

Prinsip-prinsip tersebut mengalahkan prinsip-prinsip regulatif sosial lain, seperti misalnya hukum positif. Keunggulannya, kedua prinsip tersebut merupakan suatu kenyataan sosiologis. Dalam pandangan Jawa, prinsip-prinsip keselarasan harus didahulukan dari hukum positif.

Masyarakat Jawa berpandangan bahwa usaha untuk menjamin kepentingan dan hak masing-masing individu tidak boleh mengganggu keselarasan sosial. Apa pun yang diharapkan dan diusahakan oleh individu, betapa pun hak dan kepentingannya, bagaimana ia menilai suatu keadaan, pandangan Jawa mengarahkan individu untuk bertindak sejauh keselarasan tetap dijaga dan derajat hirarkis tetap dihormati. Prinsip kerukunan dan hormat menuntut agar selalu menguasai perasaan dan keinginan dengan kesediaan untuk memomorduakan kepentingan pribadi terhadap pertahanan keselarasan masyarakat.

Energi Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Desa

Energi sosial lokal di pedesaan memiliki peran yang sangat strategis bagi upaya pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan desa. Hal ini terkait dengan karakteristik energi tersebut yang secara *inherent* berada, tumbuh, dan berkembang di kalangan masyarakat desa. Oleh karena itu upaya memberdayakan masyarakat dalam pembangunan pedesaan tidak dapat mengabaikan energi sosial lokal tersebut.

Salah satu peran *energy social* ini adalah melalui fungsionalisasi kelembagaan dalam upaya pemberdayaan masyarakat

desa. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan peran serta masyarakat, yang merupakan modal utama dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan. Strategi pemberdayaan masyarakat desa dilakukan melalui pengembangan komunikasi sosial, mengintegrasikan aliansi mitra strategis ke dalam program pembangunan, melakukan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dan melakukan pendekatan dari segi agama dan budaya masyarakat setempat.

Dari kehidupan masyarakat desa di daerah penelitian ditemukan bahwa strategi mengembangkan komunikasi lingkungan dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain penemukenalan tokoh masyarakat yang mampu menyampaikan pesan pemberdayaan masyarakat. Kemudian internalisasi aliansi mitra strategis ke dalam program yang dilakukan melalui pendekatan yang melibatkan peran kelompok masyarakat secara aktif. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara memberikan dukungan dan pengakuan kepada kelompok-kelompok masyarakat yang mempunyai potensi posisi tawar untuk memberdayakan masyarakat desa dalam pembangunan. Sedangkan pendekatan langsung kepada kelompok sasaran dilakukan kepada kelompok *profesi* di pedesaan seperti pekerja, buruh, petani, nelayan, pengusaha dan lain-lain.

Pelaksanaan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara dialog, pendidikan, pelatihan dan lain sebagainya. Dalam perspektif sosiologis, upaya-upaya inilah yang dikenal dengan *community empowerment* yang meliputi penguatan inisiatif lokal, peningkatan posisi tawar masyarakat (*bargaining power*) dan

orientasi “gerakan”. Konsep ini menekankan upaya motivasi dan stimulasi kepada masyarakat untuk dapat mencapai kemandirian dan keberdayaan dalam menyikapi persoalan.

Strategi pemberdayaan masyarakat desa tersebut akan berhasil dengan baik, manakala masyarakat sadar dan paham akan kebutuhannya; mendapatkan informasi yang benar; termotivasi untuk berperan serta dalam pengambilan keputusan demi kepentingan umum, mendapat respons yang cukup dari pemerintah.

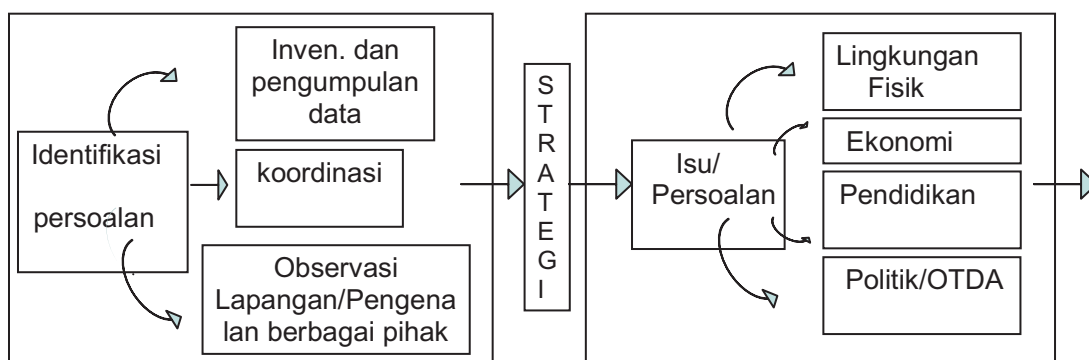
Masyarakat pedesaan di Kabupaten Pacitan Jawa Timur, yang 93% hanya berpendidikan sampai sekolah dasar baik tamat ataupun tidak tamat, memerlukan sentuhan intuitif yang efektif dalam memberdayakan potensi mereka dalam pembangunan di desanya. Dengan sentuhan yang efektif tersebut, tanpa terasa mereka dilibatkan secara aktif dalam kegiatan pembangunan. Sentuhan yang dimaksud adalah berupa terbinanya ikatan emosional antara agen-agen pemberdaya dengan masyarakat desa secara keseluruhan, sehingga terjalin secara bersama-sama rasa saling percaya, membutuhkan bersama, serta visi bersama. Dengan demikian proses pemberdayaan dimaksud tidak mengarah pada proses instruksi dari agen-agen

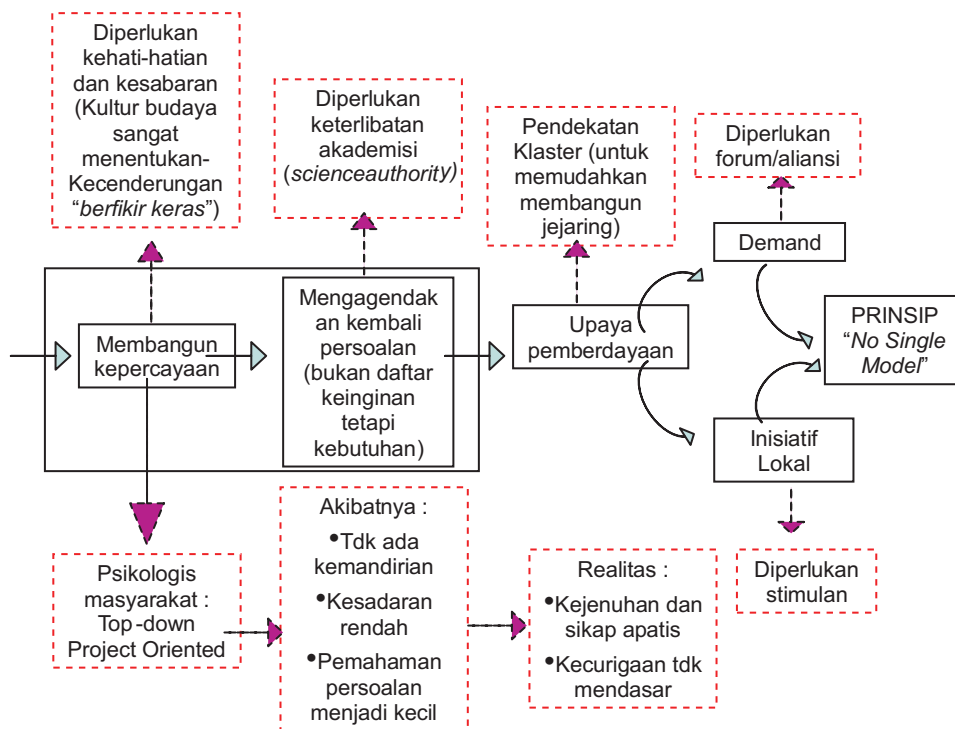
pemberdaya, baik formal (lurah, ketua RW, ketua RT) maupun informal (guru, kyai, aktifis sosial).

Mencermati kondisi lapangan yang ada, ditemukan betapa *energy social* mempunyai kekuatan yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat pada pembangunan di tingkat lokal. Beberapa langkah dari energi sosial dalam memberdayakan masyarakat teridentifikasi secara sistematis mulai dari identifikasi persoalan, koordinasi, pengetrapan strategi yang didasarkan kepada isu-isu lokal yang berkembang, membangun kepercayaan publik yang kemudian mengemas kembali agenda persoalan yang bukan merupakan daftar keinginan tetapi merupakan daftar kebutuhan masyarakat.

Atas dasar identifikasi tersebut kemudian dilakukan upaya pemberdayaan yang bertujuan untuk menumbuhkan dan mengembangkan *demand* dan *inisiatif* lokal melalui prinsip *no singe model*. Proses pemberdayaan yang dilakukan disusun ke dalam konsep-konsep yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.

Secara visual langkah-langkah pemberdayaan masyarakat tersebut dapat dilihat dalam bagan berikut ini





Berdasarkan bagan di atas, upaya pemberdayaan masyarakat berawal dari identifikasi persoalan dengan melakukan inventarisasi dan pengumpulan data, observasi lapangan atau pengenalan berbagai pihak yang terkait dan melakukan koordinasi dengan pemerintahan dalam level kabupaten/kota. Tahap berikutnya adalah membuat strategi dan penerapan strategi yang didasarkan kepada isu-isu lokal yang berkembang seperti lingkungan fisik, ekonomi, pendidikan, dan politik. Langkah selanjutnya adalah membangun kepercayaan publik dengan memperhatikan budaya setempat. Dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat, upaya yang paling penting dilakukan adalah membangun kepercayaan kepada masyarakat.

Setelah kepercayaan terbangun, langkah yang diambil kemudian adalah mengagendakan kembali persoalan-persoalan yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan kehidupan masyarakat. Dalam hal ini persoalan disusun

bukan berdasarkan daftar keinginan tetapi merupakan daftar kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks demikian, peran unsur akademis (guru, mahasiswa, para pemuka agama setempat) menjadi sangat penting guna pembekalan informasi dan pengetahuan kepada kader-kader pendamping masyarakat. Selain itu, pendekatan kluster dalam hal ini perlu dilakukan, karena dari sini kemudian timbul simpul-simpul sebagai jejaring yang dapat membangun kekuatan untuk menumbuhkan dan mengembangkan *demand* dan inisiatif lokal melalui prinsip *no single model*. Artinya tidak ada model yang dapat direplikasikan secara utuh pada daerah satu dengan lainnya. Untuk itu, upaya-upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan perlu dilakukan *main-tenance*. Pola-pola *maintenance* yang dilakukan adalah sebagai berikut.

Pertama, pembinaan terhadap kelompok yang telah terbentuk dalam upaya keberlanjutan kemitraan. Melalui monitoring yang dilakukan secara berkala dilakukan

pemantauan perkembangan kondisi kelompok dan gerakan-gerakan aktivitas yang dilakukan. *Kedua*, memberikan stimulan terhadap peluang-peluang *inisiatif lokal* dan *demand* sebagai pola pemotivasi akan kebutuhan masyarakat. *Ketiga*, kegiatan diarahkan lebih kepada kegiatan nyata yang diinternalisasikan dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakat pada lokus aktivitas. *Keempat*, penggalan komitmen secara terus menerus, sehingga konsistensi terhadap gerakan masyarakat dapat terus tumbuh dan berkembang. *Kelima*, memanfaatkan lembaga lokal yang telah terbentuk agar lebih mudah melakukan pergerakan. Dan *ketujuh*, berupaya tidak menggunakan *single model* pemberdayaan, karena karakteristik dan persoalan masyarakat yang berbeda.

Selanjutnya, dengan mengamati kondisi lapangan yang ada, model pemberdayaan yang dilaksanakan tersebut akan lebih sistematis jika dikemas dalam tujuh langkah berikut.

Pertama, melakukan meta-plan terhadap permasalahan yang terjadi pada setiap wilayah melalui pendekatan pengelompokan wilayah (*cluster*) yang mendesak untuk ditangani berkaitan dengan isu-isu strategis dengan melibatkan semua unsur-unsur yang secara aktif terlibat. *Kedua*, melakukan inisiasi dan pengenalan program kepada *civil society* di wilayah tertentu seperti para tokoh agama, tokoh adat, pemuka masyarakat, ketua kelompok, individu, LSM, tokoh ormas, organisasi-organisasi profesi dan lain sebagainya.

Ketiga, pembekalan pelatihan semacam ToT (*training of trainers*) bekerjasama dengan Perguruan Tinggi

setempat sebagai fasilitator atau mitra kerja. ToT ini merupakan pelatihan untuk pelatih guna peningkatan kapasitas individu dari pasif menjadi aktif dengan tujuan pembentukan kader-kader perintis. *Keempat*, penguatan komitmen yang diwujudkan dengan aksi nyata sebagai langkah awal melalui program percontohan. *Kelima*, pembentukan jejaring diantara mereka dan mulai menularkannya kepada kelompoknya masing-masing untuk memperluas pengaruhnya ke kawasan-kawasan sekitarnya. Hal ini terindikasi dengan pembentukan aliansi-aliansi strategis.

Keenam, mulai membangun instalasi dan menghubungkan kekuatan komunitas di tiap kelompok wilayah (*cluster*) satu sama lain antar wilayah lintas daerah sehingga merupakan poros yang kuat. *Ketujuh*, ekspansi dan perluasan jejaring ke wilayah-wilayah pengembangan yang strategis untuk ditangani di luar poros yang terbangun dan memelihara kesinambungan hubungan informasi dan komunikasi di masing-masing klaster, sekaligus mengevaluasi sampai terbangunnya kesadaran kolektif.

SIMPULAN

Energi sosial di pedesaan yang keberadaannya merupakan bagian inheren dari kehidupan masyarakat desa, memiliki potensi yang strategis dalam menggerakkan pemberdayaan masyarakat desa. Energi ini berupa paduan yang solid dari seluruh potensi elemen masyarakat, mulai dari kelompok pendidik, pengusaha, petani, pelajar, tokoh agama, tokoh adat; yang semua tersedia dalam kehidupan masyarakat

desa.

Dukungan keluarga dan ikatan kekerabatan berfungsi sebagai media kerjasama dan tolong-menolong dalam mengatasi masalah yang dihadapi para warga di masing-masing lingkungan sosial yang ada. Bahkan tampak lebih efektif mengatasi masalah di masyarakat pedesaan Pacitan melalui forum-forum kekerabatan. Hal ini didasarkan pada rasa saling percaya diantara anggota masyarakat desa, yang dibingkai dengan ikatan emosi dan tata nilai yang sama. Kondisi inilah yang sangat strategis bagi upaya pemberdayaan masyarakat bagi pembangunan desa.

Kepemimpinan lokal memiliki potensi sebagai energi sosial yang berfungsi mengarahkan masyarakat menuju pencapaian kesejahteraan bersama lewat berbagai kegiatan atau urusan, terdapat kecenderungan di masyarakat pedesaan bahwa kepemimpinan informal yang dimiliki para tokoh masyarakat tidak kalah efektifnya dengan kepemimpinan formal. Hal ini didasarkan pada persepsi masyarakat desabawa pemimpin informal memiliki keunggulan-keunggulan yang harus selalu dihormati dan ditaati. Dengan demikian menggerakkan para pemimpin informal di daerah pedesaan menjadi sangat penting artinya bagi upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dengan demikian terdapat empat aspek penting kelembagaan lokal yang ada di lingkungan pedesaan Pacitan, yaitu kekerabatan, lokalitas, nilai budaya, dan kepemimpinan lokal.

DAFTAR RUJUKAN

- Albrow, M. *Globalization Knowledge and Society*, London: Sage Publication, 2006.
- Anderson, Benedict R.O.G., *Mythology and the Tolerance of the Javanese*, Ithaca: Monograph Series, Modern Indonesia Project, Cornell University, 1996
- — — — —, *Komunitas - Komunitas Terbayang*, (terj) Intan Naomi, Diterbitkan atas Kerjasama Insist Jakarta, 2001.
- Arinanto, Satya. *Islah dalam Perspektif Keadilan Tradisional*. Kompas, 16 Maret 2001.
- Bachtiar, H. W., *Budaya dan Manusia Indonesia*, Yogyakarta: PT Hanindita, 1990
- Beilharz, Peter, *Teori-Teori Sosial: Observasi Kritis Terhadap Para Filosof Terkemuka*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2002.
- Benda-Beckmann, F. Von, *Dari Hukum Manusia Primitif Sampai Ke Penelaahan Sosio-Hukum Masyarakat-Masyarakat Kompleks*, Dalam T.O. Ihromi, *Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 1993.
- Berger, Peter L. and T. Luchmann, *The Social Construction Of Reality*, New York: Doubleday and Company, Inc, 1966.
- Bogdan, R. C. dan Biklen, S.K., *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods*, Boston, London, Sydney, Toronto: Allyn and Bacon Inc, 1982.

PERAN PAGUYUBAN PEDAGANG LOKAL SEKARAN DALAM MENGUATKAN EKONOMI KERAKYATAN DI KELURAHAN SEKARAN KOTA SEMARANG

Elly Kismini, Asma Luthfi, Harto Wicaksono

Jurusan Sosiologi dan Antropologi, FIS, UNNES

Info Artikel

Sejarah Artikel
Diterima Mei 2016
Disetujui Juni 2016
Dipublikasikan Juni 2016

Keywords :

*Economic Democracy, Merchants
Grocery, Roles, PPLS*

Abstrak

Kehadiran dan perkembangan waralaba atau ritel modern di Kelurahan Sekaran membuat pelaku bisnis tradisional, khususnya pedagang kelontong mengalami penurunan penghasilan. Kondisi ini membuat mereka membentuk perkumpulan yang dikenal dengan PPLS (Paguyuban Pedagang Lokas Sekaran). Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran PPLS dalam mengkonsolidasikan pedagang kelontong agar dapat bertahan dalam persaingan bisnis dengan waralaba dan ritel modern. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan observasi, wawancara dan studi dokumentasi sebagai metode pengumpulan datanya serta teknik triangulasi data sebagai validitas datanya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran dan aktifitas PPLS dalam menguatkan ekonomi kerakyatan adalah dengan cara menampung aspirasi dan menjadi wadah untuk eksistensi ekonomi masyarakat Sekaran, menjadi media kontrol terhadap kebijakan pemerintah dan pihak-pihak terkait, menjadi wadah bagi masyarakat lokal untuk mengembangkan usaha kelontongannya yang memiliki daya saing yang tinggi dengan ritel modern.

Implikasi dari kehadiran PPLS ini adalah menguatnya solidaritas sesama pedagang kelontong, terjadinya renegosiasi antara masyarakat lokal, pemerintah, dan pemilik toko ritel modern, tumbuhnya kesadaran kritis masyarakat yang mampu mendorong lahirnya gerakan sosial, dan terbukanya cara pandang masyarakat mengenai strategi penguatan dan pengembangan usaha ekonomi mereka.

Abstract

The presence and development of modern retail franchises or village have now made the traditional business people, especially decreasing penghasilan. Kondisi grocer makes them form associations known as PPLS (Lokas Traders Association sekaran). Artikel aims to explain role in consolidating haberdasher PPLS in order to withstand the competition with waralaba and retail modern. Penelitian done with a qualitative approach that uses observation, interview and documentation as methods of data collection and data triangulation technique as the validity of the data. The results showed that the role and aktifitas PPLS in strengthening democratic economy is a way to accommodate the aspirations and be a forum for the existence of the local economy have now, become a media control over government policy and the relevant parties, be a place for people lokal untuk mengembangkan effort kelontongannya who coined competitiveness high with modern retail.

The implications of the presence of PPLS this is the strengthening of